

Mendag Lutfi Perkenalkan Lin Che Wei

MANTAN Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengungkap alasan Lin Che Wei dilibatkan dalam rapat terkait dengan kelangkaan minyak goreng (migor). Lin Che Wei merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi perizinan persetujuan ekspor (PE) minyak sawit atau *crude palm oil* (CPO) di Kemendag.

"Khusus kaitan migor awalnya dibawah Pak Menteri (M Lutfi). (Lin Che Wei) diperkenalkan ke saya dan Dirjen Daglu (mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana)," kata Nurwan saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin.

Nurwan mengatakan Lin Che Wei ikut rapat melalui Zoom pada 14 Januari 2022. Rapat itu membahas penyusunan skenario stabilisasi harga dan ketersediaan stok minyak goreng serta bahan bakunya.

Menurut Nurwan, salah satu skenario yang dibahas, yakni mengenai pemenuhan kewajiban pasar domestik atau *domestic market obligation* (DMO) sebesar 20% oleh pengusaha sawit melalui diskresi Menteri Perdagangan. Usulan itu disampaikan Lin Che Wei. "Termasuk DMO dan alternatif yang didapat," imbuh Nurwan.

Usulan Lin Che Wei itu disetujui mantan Menteri Perdagangan M Lutfi.

Namun, Nurwan dan Indra Sari masih menelaah ide Lin Che Wei.

"Skemanya disetujui, tetapi besaran DMO 20% dipelajari. Saya dengan Pak Indra Sari mempelajari kembali dan memang angkanya kami sepakat di 20%," ujar Nurwan.

Di sisi lain, Nurwan mengaku sudah mengenal Lin Che Wei sebelum diperkenalkan M Lutfi. Menurut dia, Lin Che Wei memang punya latar belakang yang kuat di persawitan.

Dalam perkara dugaan korupsi PE CPO, lima orang didudukkan sebagai terdakwa. Mereka, yakni eks Dirjen Daglu Indra Sari Wisnu Wardhana, tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Weibinanto Halim-djati alias Lin Che Wei, dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.

Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley Ma dan General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang.

Mereka didakwa memperkaya diri, orang lain, dan korporasi yang meliputi Grup Wilmar, Grup Musim Mas, serta Grup Permata Hijau.

Perbuatan mereka disebut telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara total sekitar Rp18 triliun. Kerugian itu terdiri dari keuangan negara yang dirugikan Rp6,05 triliun dan perekonomian negara sejumlah Rp12,3 triliun. (Fah/P-2)



MI/MOH IRFAN

JALANI SIDANG LANJUTAN KASUS MANDALA KRIDA: Direktur Utama PT Java Orient Properti (JOP) Dadan Jaya Kartika mengenakan rompi tahanan saat akan menjalani sidang lanjutan secara virtual di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin. Dadan Jaya menjalani sidang lanjutan sebagai terdakwa atas kasus dugaan suap kepada Wali Kota Yogyakarta periode 2012-2022 Haryadi Suyuti, untuk mengurus izin mendirikan bangunan proyek pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro yang termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta.

Keadilan Restoratif di Tipikor Berbahaya

Gagasan yang dilontarkan komisioner terpilih KPK Johanis Tanak itu justru akan melanggengkan impunitas terhadap para koruptor.

Tri SUBARKAH
subarkah@mediaindonesia.com

IDE *restorative justice* (RJ) atau keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi (tipikor) yang diembuskan komisioner terpilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak dinilai membahayakan. Bila benar diterapkan akan menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Menurut peneliti Pusat Studi Antikorupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah, gagasan pengganti Lili Pintauli Siregar tersebut tidak sejalan dengan kualifikasi korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Gagasan Johanis, lanjutnya, justru akan melanggengkan impunitas terhadap para koruptor.

"Implikasinya, praktik RJ tersebut tidak akan memberikan dampak efek jera sama sekali," kata Herdiansyah kepada *Media Indonesia*, Kamis (29/9).

Johanis juga mantan Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) mengemukakan usulan penerapan RJ pada kasus korupsi di hadapan Komisi III DPR. Ia menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon

komisioner KPK.

Johanis menilai RJ tidak hanya bisa diterapkan untuk pidana umum, tetapi juga bisa untuk pidana khusus, dalam hal ini korupsi. Disebutkannya pula, kendati penerapan RJ tersebut tidak ada di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pengaturannya dapat melalui peraturan presiden.

Johanis terpilih menggantikan Lili melalui proses pemungutan suara di Komisi III. Johanis mendapatkan 38 dari 53 suara, mengungguli kandidat lainnya, yakni I Nyoman Wara dengan 14 suara.

Herdiansyah menyoroti sikap Komisi III yang tidak mendalami gagasan Johanis tersebut. Ia berpendapat ide RJ untuk tipikor mungkin menguntungkan para anggota dewan.

"Juga menguntungkan para koruptor, teman-teman para koruptor, dan yang akan jadi koruptor di kemudian hari," cetusnya.

Hal senada juga disampaikan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Zaenur Rohman yang menyebut ide Johanis sangat aneh. Pasalnya, penerapan RJ selama ini sangat berperspektif korban. Sementara itu, korban dalam tipikor ialah

masyarakat secara luas.

"Tidak mungkin adanya semacam perdamaian antara pelaku dan korban. Kepentingan korban juga tidak bisa diakomodasi dalam proses RJ kalau itu ialah tipikor," terang Zaenur.

Ia menegaskan RJ sama sekali tidak relevan untuk perkara tipikor.

Kejaksanaan tolak

Penghentian penuntutan perkara melalui mekanisme RJ selama ini telah diterapkan institusi Kejaksaan. Kendati demikian, Kejaksanaan baru mengaplikasikannya pada tindak pidana umum yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun dan kerugiannya kurang dari Rp2,5 juta.

Dalam proses perkembangannya, Kejaksanaan juga menerapkan RJ untuk tindak pidana narkoba. Namun, RJ ini hanya menyasar bagi para pengguna narkoba yang dinilai sebagai korban.

Jaksa Agung Sanitair Burhanuddin dalam wawancara dengan *Metro TV* pada Senin (26/9) menegaskan tidak ada rencana untuk menerapkan RJ bagi tipikor.

"Sampai saat ini kita tidak semua (perkara) bisa kita lakukan RJ, apalagi untuk korupsi. Tidak akan melangkah ke sana." (P-2)

Narasi Aparat Disebut Dominasi Sidang Paniai

KOALISI Masyarakat Sipil Pemantau Paniai 2014 menilai jaksa penuntut umum (JPU) tidak optimal untuk membuktikan unsur sistematis atau meluas dalam sidang lanjutan perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Peristiwa Paniai. Sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi, kata Koalisi, didominasi narasi aparat.

Perkara Paniai disidangkan di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar. Dari 12 saksi yang diminta diperiksa, Rabu (28/9), JPU hanya berhasil menghadirkan empat orang ke persidangan.

Seluruhnya ialah anggota polisi, yaitu Briptu Andy Richo Amir, Briptu Abner Onesium Windesi, Briptu Ridlo Bagary, dan Aipda Haile ST Wambarauw.

"Tim JPU gagal menghadirkan saksi warga sipil sehingga menyebabkan sidang kedua ini didominasi narasi aparat", demikian keterangan tertulis Koalisi, kemarin.

Komis untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan Tindak Kekerasan (Kontras) yang menjadi bagian dari Koalisi menyayangkan nihilnya pembahasan komprehensif ihwal Operasi Aman Matoa V. Padahal, operasi tersebut menjadi salah satu latar belakang peristiwa dalam laporan penyelidikan Komnas HAM.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Tioria Pretty Stephanie mengatakan hasil pemeriksaan para saksi dalam sidang kedua mengungkap adanya pelaku lapangan. Briptu Andi, misalnya, menyebut anggota Provost bernama Gatot yang menembak korban di depan Koramil Paniai hingga tewas.

Dalam perkara Paniai, Kejagung hanya menyeret terdakwa tunggal, yaitu mantan perwira penghubung pada Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Panai Mayor Inf (Purn) Isak Sattu, ke ruang sidang.

Dalam sidang berikutnya, Koalisi menyebut pengadilan wajib menggali fakta dari pihak lain di luar narasi yang dikembangkan saksi yang dihadirkan JPU. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Suredana mengatakan sidang berikutnya akan digelar pada Senin (3/10) dengan agenda pemeriksaan saksi.

Ketut mengatakan masih terbuka kemungkinan penambahan tersangka yang terungkap melalui fakta sidang. (Tri/P-2)

Keterangan para Dekan Unila Perkuat Bukti Suap

REKTOR Universitas Lampung (Unila) Karomani diduga mengatur kelulusan calon mahasiswa baru dengan jalur suap. Dugaan itu didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memeriksa sebelas saksi pada Rabu (28/9).

"Didalami dugaan adanya perintah tersangka KRM (Karomani) untuk mengondisikan maba (calon mahasiswa baru) yang telah mendapat persetujuan tersangka untuk diluluskan," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, kemarin.

Sebelas saksi itu, yakni Dekan Fakultas Kedokteran Unila Dyah Wulan Sumekar, Dekan Fakultas Hukum Patuan Raja, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suharso, Dekan Teknik Helmy Fitriawan, Dosen Unila Muallimin, dan Dekan Fakultas Pertanian Irwan Sukri Banuwa.

KPK juga memeriksa Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Suropto Dwi Yuwono, Kepala Biro Perencanaan dan Humas Budi Sutomo, Sekretaris Biro Perencanaan dan Humas Shinta Agustina, BPP Biro Perencanaan dan Humas Nurhati BR Ginting, dan staf pembantu Rektor I Tri Widioko.

Ali enggan memerinci total calon mahasiswa baru yang dikondisikan Karomani. Lembaga Antikorupsi juga sempat mengonfirmasi sejumlah barang bukti yang ditemukan penyidik dalam kasus ini. "Didalami pengetahuannya

antara lain terkait dengan konfirmasi barang bukti dokumen penerimaan maba Unila," ujar Ali.

Rektor Unila Karomani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa. Selain Karomani, KPK juga menetapkan Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung Heryandi, Ketua Senat Universitas Lampung Muhammad Basri, dan pihak swasta Andi Desfiandi sebagai tersangka.

Karomani diduga menerima uang total Rp603 juta yang berasal dari orangtua calon mahasiswa baru. KPK menemukan total Rp7,5 miliar yang sebagian sudah dialihkan menjadi tabungan deposito dan emas batangan.

KPK saat ini tengah menggencarkan kerja sama pencegahan korupsi dengan perguruan tinggi. KPK juga bakal menguatkan pendidikan antikorupsi di lingkungan kampus.

"Fungsi pencegahan bisa dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi. Pada dunia pendidikan, sikap yang teguh mempertahankan prinsip dan tidak mau korupsi menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai moral," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, kemarin.

Kerja sama dengan perguruan tinggi sejalan dengan tiga strategi pemberantasan korupsi yang digaungkan Lembaga Antikorupsi. (Fah/Can/P-2)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
Untuk Tahun Yang Berakhir 30 Juni 2022					
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)					
ASET	2022	2021	LIABILITAS DAN EKUITAS	2022	2021
ASET LANCAR			LIABILITAS LANCAR		
Kas	5.868.735	2.639.740	Utang usaha	-	1.235
Piutang usaha - pihak ketiga	3.045.248	3.185.096	Pihak berelasi	1.213.317	1.453.238
Piutang lain-lain	-	61.497	Utang pajak	154.944	405.837
Pihak berelasi	689.168	107.090	Utang lain-lain	-	137.195
Pihak ketiga	229.291	107.090	Pihak berelasi	7.613	161.813
Biaya dibayar dimuka	887.070	1.021.566	Pihak ketiga	508.437	670.039
Aset tersedia untuk dijual	-	1.080.000	Biaya yang masih harus dibayar	1.884.311	2.829.357
Pajak dibayar dimuka	2.284.875	2.411.910	Jumlah liabilitas lancar		
Jumlah aset lancar	13.004.387	10.659.102	LIABILITAS TIDAK LANCAR		
			Liabilitas imbalan karyawan pascakerja	257.836	696.827
			JUMLAH LIABILITAS	2.142.147	3.526.184
ASET TIDAK LANCAR			EKUITAS		
Aset tetap	30.474.352	31.990.685	Modal saham:		
Uang jaminan dan biaya dibayar dimuka	230.201	20.385	Modal dasar 1.000.000.000 lembar; ditempatkan dan disetor penuh 609.130.000 lembar dengan nilai nominal Rp100	25.550.755	25.550.755
Aset pajak tangguhan	-	453	Tambahan modal disetor	39.837.131	39.837.131
Jumlah aset tidak lancar	30.704.553	32.011.523	Defisit	2.118.202	2.118.202
			Belum ditentukan penggunaannya	(25.939.295)	(28.361.647)
			JUMLAH EKUITAS	41.566.793	39.144.441
JUMLAH ASET	43.708.940	42.670.625	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	43.708.940	42.670.625

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN					
Untuk Tahun Yang Berakhir 30 Juni 2022					
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)					
	Modal saham	Tambahan modal disetor	Ditetapkan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	Jumlah ekuitas
Saldo Per 30 Juni 2020	25.550.755	39.837.131	2.118.202	(22.965.440)	44.540.648
Penyesuaian penerapan PSAK 71	-	-	-	(574.269)	(574.269)
Saldo per 30 Juni 2020 setelah penyesuaian	25.550.755	39.837.131	2.118.202	(23.539.709)	43.966.379
Rugi tahun berjalan	-	-	-	(4.807.725)	(4.807.725)
Beban komprehensif lain	-	-	-	(14.213)	(14.213)
Saldo per 30 Juni 2021	25.550.755	39.837.131	2.118.202	(28.361.647)	39.144.441
Labanya tahun berjalan	-	-	-	2.412.614	2.412.614
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	9.738	9.738
Saldo per 30 Juni 2022	25.550.755	39.837.131	2.118.202	(25.939.295)	41.566.793

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			
Untuk Tahun Yang Berakhir 30 Juni 2022			
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)			
	2022	2021	
PENDAPATAN	20.851.903	16.767.073	
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(16.471.169)	(19.758.895)	
LABA (RUGI) KOTOR	4.380.734	(2.991.822)	
LABA USAHA			
Beban umum dan administrasi	(2.074.361)	(2.135.792)	
Pendapatan lain-lain - neto	137.176	346.347	
LABA (RUGI) USAHA	2.443.549	(4.781.267)	
(BEBAN) PENGHASILAN KEUANGAN LAIN-LAIN			
Pendapatan keuangan	6.397	1.445	
Beban keuangan	(8.485)	-	
(Beban) penghasilan keuangan lain-lain - neto	(2.088)	1.445	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.441.161	(4.779.822)	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(28.847)	(27.903)	
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	2.412.614	(4.807.725)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	9.738	(14.213)	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	9.738	(14.213)	
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	2.422.352	(4.821.938)	
Labanya (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan	2.412.614	(4.807.725)	
Total laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan	2.422.352	(4.821.938)	
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	0,0040	(0,0079)	

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN			
Untuk Tahun Yang Berakhir 30 Juni 2022			
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)			
	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:			
Penerimaan kas dari pelanggan	20.991.751	18.000.090	
Pembayaran kas ke pemasok dan karyawan	(13.964.565)	(12.238.402)	
Pembayaran pajak penghasilan	(162.330)	(282.956)	
Penerimaan bunga	6.397	1.445	
Pembayaran bunga	(8.485)	-	
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	6.862.768	5.480.177	
ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI:			
Hasil penjualan aset tetap	5.172	320.593	
Penjualan dari aset tersedia untuk dijual	1.080.000	-	
Perolehan aset tetap	(4.718.945)	(5.746.373)	
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(3.633.773)	(5.425.780)	
KENAIKAN BERSIH KAS	3.228.995	54.397	
KAS, AWAL TAHUN	2.639.740	2.585.343	
KAS, AKHIR TAHUN	5.868.735	2.639.740	



Jakarta, 30 September 2022

Direksi
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk.

Catatan :
1. Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kossasih, Nurdyanan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, dalam laporan auditor independent, masing - masing tanggal 30 September 2022 dan tanggal 29 September 2021.
2. Informasi tertentu, seperti catatan atas laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.